

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut KBI (Kamus Bahasa Indonesia) pemberdayaan berasal dari kata "daya", yaitu kemampuan untuk melakukan suatu hal, kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan.¹ Pemberdayaan berasal dari kata *power*, kata ini secara konseptual memiliki arti keberdayaan atau kekuatan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012) pemberdayaan adalah kumpulan kegiatan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menguatkan dan mengoptimalkan kemampuan yang lemah dan yang mengalami masalah kemiskinan.² Sedangkan menurut Eddy Ch. Papilaya (2001) pemberdayaan adalah usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat yang dilakukan dengan cara menggerakkan masyarakat, memotivasi masyarakat, menyadarkan masyarakat atas kemampuan yang dimiliki, dan meningkatkan kemampuan tersebut.³

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah kumpulan program kegiatan untuk meningkatkan potensi, memberikan kekuatan, meningkatkan potensi yang dimiliki dan menciptakan kemandirian kepada setiap individu, sehingga mereka mampu untuk mencukupi keperluan hidup dan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Menurut Suharto (2010), pemberdayaan berarti mengarah pada kemampuan individu, terutama kumpulan orang rentan dan lemah, untuk memperoleh kekuatan.⁴

1) Untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka mempunyai kebebasan. Dalam hal ini, tidak hanya bebas

¹ Rachmat Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Ilmu), 130.

² Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 10.

³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

⁴ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 11.

dalam mengutarakan pendapat, tetapi juga bebas dari rasa lapar, ketidaktahuan dan rasa sakit

- 2) Untuk menciptakan sumber daya yang produktif, sehingga memungkinkan orang agar dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dengan kualitas yang tinggi.
- 3) Untuk dapat terlibat dalam proses pembangunan dan menyampaikan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Pengertian Masyarakat

Menurut KBI (Kamus Bahasa Indonesia) masyarakat adalah setiap orang yang berada dalam suatu kelompok tertentu, dimana kelompok tersebut telah membentuk suatu kehidupan yang berbudaya.⁵ Menurut Harton (1992) masyarakat adalah sekelompok individu yang saling terikat dalam suatu interaksi karena faktor kebutuhan dan kepentingan bersama, sehingga kelompok tersebut selalu bertemu untuk memenuhi kepentingan mereka.⁶

Mayo (1998) mengungkapkan bahwa masyarakat diartikan dalam dua konsep yaitu: (1) masyarakat sebagai suatu "wadah bersama", yaitu suatu tempat dengan geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun warga, sebuah kampung di daerah pedesaan, atau rumah-rumah di daerah perkotaan, dan (2) masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yaitu memiliki kepentingan yang sama berdasarkan tradisi budaya dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat dari golongan minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan kebutuhan tertentu.⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah setiap individu dalam kelompok tertentu yang saling membutuhkan satu sama lain, saling terikat dalam setiap interaksi, sehingga membentuk suatu kehidupan yang memiliki identitas berupa adat istiadat atau budaya, nilai dan norma yang dimiliki kelompok tersebut.

⁵ Rachmat Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Ilmu), 449.

⁶ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan* (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 41.

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 39.

Suatu masyarakat didasarkan pada tempat dan perasaan komunitas lokal. Menurut RM Mac Iver dan Page, perasaan komunitas lokal memiliki 3 unsur, yaitu:⁸

- 1) Seperasaan, yaitu setiap individu mencoba mengidentifikasi diri mereka dengan setiap individu yang ada di sekelilingnya atau di lingkungannya, sehingga setiap individu yang ada di sekitarnya menyebutnya sebagai "kelompok kami" dan "perasaan kami".
- 2) Sepenanggungan, yaitu setiap individu menyadari tugasnya dalam suatu kelompok, dan kondisi kelompok tersebut memungkinkan dia untuk memenuhi tugasnya.
- 3) Saling membutuhkan, yaitu setiap individu dalam suatu kelompok akan merasa bahwa dirinya memiliki ketergantungan pada individu yang lainnya, seperti kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis.

Kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi oleh bentuk komunitas tempat mereka tinggal. Sebuah komunitas, yang mewakili satu kehidupan manusia (kota, desa) dan serangkaian emosi (cinta, kesetiaan), akan mempengaruhi kehidupan sosial setiap masyarakat.

Untuk menentukan identitasnya, masyarakat memiliki ciri-ciri yang khas. Menurut (Koentjaraningrat 2009) menjelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat adalah:⁹

- 1) Komunikasi antar masyarakat
- 2) Adat budaya, norma, hukum, dan aturan khusus yang mengatur pola perilaku masyarakat kota atau desa
- 3) Kontinuitas (kesinambungan) waktu
- 4) Memiliki rasa identitas yang kuat, sehingga dapat mengikat seluruh masyarakat

c. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sudah tidak asing lagi di Indonesia, karena pemberdayaan merupakan kata kunci yang digunakan untuk memajukan pembangunan masyarakat. Menurut Gunawan (2009) pemberdayaan masyarakat adalah suatu aktivitas sosial dimana masyarakat yang merencanakan dan melaksanakan secara bersamaan-sama dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sosial

⁸ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan* (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 41-42.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

atau memperbaiki masalah sosial dengan potensi yang dimiliki. Menurut Robert Chambers pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pengembangan ekonomi yang meringkas nilai-nilai sosial. Dalam konsep ini menggambarkan empat paradigma, yaitu berfokus pada masyarakat, memberdayakan, partisipatif, dan berkelanjutan.¹⁰

Menurut Payne (dalam Adi, 2012) pemberdayaan masyarakat adalah program kegiatan yang ditujukan untuk membantu setiap individu untuk memperoleh kemampuan dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya sendiri dengan tujuan untuk mengurangi masalah pribadi maupun sosial.¹¹

Menurut Vitayala (2000) pemberdayaan masyarakat merupakan usaha mengembangkan potensi masyarakat dan memampukan sumber daya manusia melalui pembangunan kelembagaan, saran dan prasarana, serta pembangunan tiga-p (pendampingan, pelatihan, dan pelayanan).¹²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam meningkatkan keberdayaan dan potensi yang dimiliki individu maupun kelompok lemah dalam melakukan segala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses yang dimaksud dalam pemberdayaan disini yaitu dengan mengadakan beragam kegiatan yang bersifat memberdayakan, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga dapat membangun, memotivasi, dan menguatkan masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menyelesaikan masalah pribadi maupun sosial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pelatihan, pendampingan, edukasi, sosialisasi, pelayanan, dan sebagainya. Adanya pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang produktif, sehingga masyarakat tersebut bisa meningkatkan pendapatannya untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, seperti

¹⁰ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 10.

¹¹ Mustangin et al., "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 01 (2017): 63.

¹² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 61

terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan memiliki tujuan untuk memandirikan seluruh lapisan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat harus difokuskan pada penyadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat, berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat melalui tindakan nyata, seperti edukasi, pelatihan, pemberian lapangan pekerjaan, pemberian modal usaha, pemberian informasi, dan menjaga masyarakat dari persaingan yang tidak sehat antara kaum lemah dan kuat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan harus terdapat aturan yang transparan dan tegas untuk melindungi masyarakat yang lemah.

Memperkuat kekuasaan masyarakat merupakan tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk kelompok yang lemah dan yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi eksternal maupun internal. Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui mengenai konsep kelompok lemah atau tidak berdaya. Berikut beberapa kategori kelompok yang disebut sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya:¹³

- 1) Kelompok lemah secara struktural yaitu dikategorikan dengan lemah secara gender, kelas, maupun etnis, contoh seperti ketidak setaraan gender, antara kelompok minoritas dan mayoritas, antara orang kaya dan miskin, antara perbedaan ras, dan sebagainya.
- 2) Kelompok lemah secara khusus yaitu seperti ketimpangan kelompok yang diakibatkan oleh perbedaan usia, penyandang disabilitas, *gay-lesbi*, dan masyarakat yang diasingkan.
- 3) Kelompok lemah secara personal yaitu orang-orang yang memiliki masalah pribadi, biasanya disebabkan oleh masalah yang bersumber dari diri sendiri atau keluarga, baik itu dalam hal ditinggal oleh orang tercinta maupun kematian orang terdekat.

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 60.

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam bukan merupakan hal yang asing, karena secara historis telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw ketika ia mengajarkan umatnya untuk mengembangkan kepedulian antar sesama umat, khususnya umat yang memiliki kelemahan dalam hal ekonomi. Dalam ajaran Islam, masyarakat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Pemberdayaan masyarakat memiliki konsep yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu pembangunan, pengembangan potensi, dan kemandirian.¹⁴ Melalui pemberdayaan dapat membawa perubahan pada kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bermartabat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُعَيِّرُ مَا يَفْعَلُ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (الرعد: ١١)

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."¹⁵

Sayyid Qutb menegaskan bahwa ayat di atas membahas mengenai perubahan yang harus dilakukan oleh manusia, karena Allah SWT tidak akan merubah kenikmatan, kemuliaan, kerendahan, bencana, kedudukan maupun kehinaan, kecuali jika mereka mau berusaha merubah hati,

¹⁴ Achmad Saeful and Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *SYAR'IE* 3 (2020): 4.

¹⁵ Al-Qur'an, Ar-Ra'd ayat 11, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta, 1982), 251.

perilaku, dan kehidupan mereka.¹⁶ Dalam hal ini, jika setiap individu yang memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya tapi tidak disertai dengan semangat dan tindakan nyata, maka untuk mewujudkan perubahan pada kehidupannya akan sulit terealisasi.

Pemberdayaa dalam ajaran Islam dibangun atas tiga prinsip, yaitu:¹⁷

1) Prinsip Kepedulian

Inti dari ajaran Islam adalah tauhid yang mengajarkan tentang pengakuan keesaan Allah SWT. Selain itu tauhid juga mengajarkan bentuk hubungan dalam wilayah kemanusiaan. Hubungan ini dapat dijalin dengan mengembangkan kepedulian dan saling menolong kepada sesama manusia sebagai bagian dari prinsip pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...
وَأْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya."¹⁸

Kepedulian merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan harus diawali dengan rasa peduli dan niat menolong sesama manusia yang membutuhkan bantuan dan bimbingan.

2) Prinsip Keadilan

Islam menegaskan untuk melaksanakan keadilan dengan baik kepada siapapun termasuk orang lemah. Penegakan keadilan merupakan misi sosial utama para nabi. Keadilan merupakan tindakan yang mendekati

¹⁶ Achmad Saeful and Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *SYAR'IE 3* (2020): 6.

¹⁷ Achmad Saeful and Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *SYAR'IE 3* (2020): 8-11.

¹⁸ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta, 1982), 107.

taqwa dan keadilan akan benar-benar tercipta jika disertai dengan tindakan nyata. Seseorang yang tidak berperilaku adil, membiarkan kemewahan, dan anti sosial pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Dalam sebuah khutbah rasul berpesan agar setiap individu dapat memperhatikan dan memberdayakan nasib kaum lemah secara ekonomi dan rasul juga mengancam pada hari kiamat akan memusuhi setiap kaum yang berdaya atau mampu namun tidak memperhatikan nasib kaum lemah:

“Wahai manusia ingatlah Allah SWT dalam agamamu dan amanatmu sekalian. Ingatlah Allah SWT berkenaan dengan orang-orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu. Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu kenakan. Dan janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang mereka tidak sanggup menanggungnya. Sebab sesungguhnya mereka adalah daging, darah, dan mahluk seperti halnya kamu sendiri. Awas, siapapun mereka yang bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuhmu di hari kiamat, dan Allah SWT adalah hakimnya...”

3) Prinsip Kesamaan

Prinsip kesamaan merupakan bagian penting dalam bidang kemanusiaan. Prinsip ini merujuk pada semangat memanusikan manusia. Dalam hal ini semua manusia baik laki-laki maupun perempuan semuanya memiliki hak yang sama. Sebagai mahluk sosial setiap manusia dituntut untuk saling membantu dan menolong, karena semua hal yang berkaitan dengan diri manusia tidak dapat dipisahkan dari bantuan dan dukungan orang lain. Semangat memanusikan manusia dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa setiap individu pasti butuh bantuan dari individu yang lain, selain itu juga dapat menghilangkan sifat arogan pada diri manusia.

Dalam prinsip kesamaan mensyaratkan agar perintah dan individu yang memiliki daya untuk melakukan pemberdayaan kepada seluruh individu yang belum memiliki keberdayaan. Pemberdayaan dilakukan bukan hanya kepada masyarakat sekitar namun juga kepada masyarakat di wilayah lainnya. Jika pemberdayaan yang

seperti ini dapat terealisasikan maka kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat teratasi.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyebutkan terdapat tiga strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu:¹⁹

- 1) **Penyadaran.** Masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan harus disadarkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek pemberdayaan adalah pemerintah dan pengelola wisata. Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan motivasi yang dibutuhkan agar menjadi lebih kuat, dan proses pemberdayaan dimulai dari pribadi masing-masing. Orang lain hanya bertindak sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat menjadi mandiri. Dengan begitu, akan tercipta suasana dalam masyarakat yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang.
- 2) **Pengkapasitasan atau penguatan.** Proses ini dapat dicapai ketika masyarakat sudah siap menerima kekuasaan. Fase ini sering disebut *capacity building*, yang melibatkan orang, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan dalam penelitian ini mengacu pada memberdayakan masyarakat desa wisata, baik secara individu maupun kelompok, dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan desa wisata. Kapasitas organisasi diterapkan dalam bentuk reorganisasi sebuah organisasi yang ingin memperoleh kekuasaan. Sebelum memberikan peluang bisnis, suatu komunitas akan dibentuk menjadi sebuah organisasi lokal. Organisasi bersifat independen dan berpola struktur mengikuti fungsi. Kapasitas sistem nilai diwujudkan dengan membantu masyarakat membentuk aturan main, misalnya: aturan bisnis umum, sistem bisnis, prosedur bisnis, dan lain-lain. Sistem nilai ini harus diikuti oleh semua anggota yang terlibat.
- 3) **Pendayaan.** Pada tahap ini masyarakat diberikan kemampuan atau daya untuk berkembang menuju kemandirian. Pemberdayaannya disesuaikan dengan kualitas *skill* masing-masing orang, misalnya

¹⁹ Dinar Wahyuni, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9, no. 01 (2018): 87–88.

memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa sesuai dengan kapasitasnya dalam mengelola usaha.

Pemberdayaan adalah suatu proses sekaligus tujuan. Proses tersebut mengacu pada serangkaian langkah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya dan masyarakat yang memiliki kekuatan namun masih terbatas dalam mencapai kemandirian. Berbeda dengan tujuan, yang mengacu pada situasi yang dicapai melalui perubahan sosial, yaitu masyarakat yang dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan taraf hidupnya dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, tolak ukur keberhasilan pemberdayaan adalah sejauh mana individu atau masyarakat berpartisipasi dalam semua kegiatan pemberdayaan.

f. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan adalah ketepatan dalam menentukan metode untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pemberian materi atau kegiatan penyuluhan. Sehingga kelompok sasaran atau masyarakat lebih mudah menerima dan memahaminya. Setiap pelaku pemberdaya harus bisa menyesuaikan metode yang digunakan dengan kondisi masyarakat yang akan diberdayakan.

Suharto (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu:²⁰

- 1) **Pemungkinan**, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara maksimal
- 2) **Penguatan**, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat secara mandiri memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya
- 3) **Perlindungan**, yaitu adanya perlindungan kepada masyarakat, khususnya penindasan kelompok lemah oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tindakan diskriminasi

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 67-68.

- 4) **Penyokongan**, yaitu pemberian dukungan dan bimbingan agar masyarakat dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam kehidupan sosial
- 5) **Pemeliharaan**, yaitu memelihara situasi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan dalam pembagian kekuasaan antar individu dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha

Terdapat beberapa cara atau tehnik yang dapat dilakukan untuk mensukseskan program pemberdayaan, yaitu:²¹

- 1) Mengembangkan relasi pertolongan yang:
 - a) Mencerminkan respon empati
 - b) Menghormati pilihan dan hak masyarakat dalam penentuan nasibnya sendiri
 - c) Menghargai perbedaan dan keunikan individu
 - d) Menegaskan kemitraan pada setiap individu
- 2) Mengembangkan komunikasi yang:
 - a) Menghormati harga diri dan martabat setiap individu
 - b) Mempertimbangkan keragaman individu
 - c) Fokus pada sasaran pemberdayaan
 - d) Merangkai setiap tantangan yang ada sebagai suatu pelajaran
 - e) Menjaga privasi setiap individu
- 3) Terlibat dalam setiap pemecahan masalah, yaitu:
 - a) Menguatkan partisipasi setiap individu dalam mencari pemecahan masalah
 - b) Menghormati hak-hak yang dimiliki setiap individu
 - c) Masyarakat harus selalu terlibat dalam setiap pembuatan keputusan dan evaluasi
- 4) Menegaskan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:
 - a) Ketaatan pada etika profesi
 - b) Berpartisipasi dalam pengembangan profesional, penelitian dan pembuatan kebijakan
 - c) Mengubah kesulitan pribadi menjadi masalah publik (bersama)
 - d) Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan

²¹ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 109-110.

g. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, yaitu mencakup semua aspek dari pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, lingkungan, dan sosial budaya. Pemberdayaan yang mengarah pada kesejahteraan harus dirancang dengan perencanaan yang matang agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut United Nations (2001) terdapat beberapa proses pemberdayaan, yaitu:²²

- 1) **Mengenal masyarakat lokal**, berarti mengenal karakter masyarakat yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa satu dengan lainnya. Dalam memberdayakan suatu kelompok diperlukan adanya sebuah hubungan timbal balik antara agen pemberdaya dengan masyarakat.
- 2) **Pengumpulan informasi tentang masyarakat lokal**, yaitu pengumpulan pengetahuan atau semua informasi tentang masyarakat lokal. Informasi ini harus faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk informasi tentang nilai, sikap, ritual dan praktik, jenis kelompok dan faktor manajemen kepemimpinan, baik formal maupun informal.
- 3) **Identifikasi pemimpin lokal**, yaitu harus mengetahui tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat. Karena semua upaya pemberdayaan masyarakat akan sia-sia tanpa dukungan dari pemimpin masyarakat lokal serta tokoh masyarakat. Oleh karena itu, faktor “pemimpin lokal” harus selalu diperhitungkan, karena memiliki pengaruh yang kuat dimasyarakat.
- 4) **Mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa ia memiliki masalah**, dalam hal ini setiap kelompok atau masyarakat tentunya memiliki adat kebiasaan yang selalu merasa baik-baik saja sehingga tanpa disadari mereka tidak merasa memiliki masalah untuk diselesaikan atau dipecahkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu pendekatan yang meyakinkan agar masyarakat dapat

²² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 60-61.

- mengetahui bahwa mereka memiliki masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- 5) **Membantu masyarakat menganalisis masalah.** Pemberdayaan masyarakat memiliki makna mendorong dan menggiring masyarakat untuk mendiskusikan masalah mereka dan merumuskan solusi bersama.
 - 6) **Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah.** Agen pemberdaya bertugas dalam membimbing masyarakat untuk memampukan mereka dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan dapat menentukan masalah mana yang paling mendesak sehingga mereka dapat memprioritaskan masalah tersebut untuk segera diselesaikan. Dengan begini berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.
 - 7) **Membangun kepercayaan diri pada masyarakat.** Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan diri masyarakat. Kepercayaan diri merupakan modal terpenting agar masyarakat dapat berswadaya.
 - 8) **Menentukan program kegiatan.** Masyarakat harus diberdayakan untuk memutuskan program yang akan dilaksanakan. Program aksi harus ditentukan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tentu saja, program dengan prioritas tinggi harus dijalankan terlebih dahulu.
 - 9) **Mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya.** Memberdayakan berarti menyadarkan dan memahami masyarakat bahwa mereka memiliki potensi kekuatan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.
 - 10) **Mendukung masyarakat untuk terus bekerja dalam memecahkan masalah.** Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat harus dikuatkan agar dapat terus bekerja memecahkan masalah.
 - 11) **Mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri.** Meningkatkan kemandirian masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pemberdayaan. Maka dari itu, diperlukan program kegiatan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Suatu komunitas akan disebut

mandiri jika ia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

h. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian kemandirian masyarakat adalah tujuan utama dan akhir dari setiap kegiatan pemberdayaan. Fokus kegiatan pemberdayaan harus dibicarakan sejak awal kegiatan, yakni pada saat sosialisasi dan identifikasi masalah, antara fasilitator/pendamping dengan masyarakat setempat sebagai kelompok sasaran. Dengan berdiskusi bersama, diharapkan masyarakat akan termotivasi dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam semua proses/tahapan kegiatan dan merasa bahwa program yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka. Dengan hal ini, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatannya sendiri, sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang baik dan tidak lagi bergantung pada siapa pun, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka bersama keluarga.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012) upaya efektif yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan adalah dengan membagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan menjadi beberapa tahapan, yaitu:²³

- 1) **Penetapan dan penyajian wilayah kerja.** Kegiatan ini dilakukan sebelum program pemberdayaan dilaksanakan. Penetapan wilayah kerja harus disetujui oleh semua anggota kelompok pelaksana, pejabat kota, beberapa perwakilan masyarakat sasaran, dan kelompok kepentingan lain (pelaku usaha, aktor, tokoh masyarakat, para pemuda, priyai, aktivis LSM, peneliti, dan lain-lain). Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, dan menciptakan sinergi serta mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan program dan kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
- 2) **Sosialisasi kegiatan,** yaitu mendiskusikan bersama rencana pemberdayaan masyarakat di wilayah sasaran. Dalam sosialisasi kegiatan perlu dilakukan identifikasi pihak dan peserta yang ikut berpartisipasi, pembagian

²³ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 116-119.

peran/tugas, pendekatan, strategi pelaksanaan dan tahapan-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan.

- 3) **Penyadaran**, hal ini dilakukan agar masyarakat menyadari keberadaannya, baik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, maupun keadaan lingkungan, seperti lingkungan fisik/teknis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam kegiatan ini, yaitu:
 - a) Menganalisis situasi bersama masyarakat mengenai potensi yang ada, permasalahan yang sedang dihadapi, penentuan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah, mengidentifikasi kelemahan internal dan ancaman eksternal.
 - b) Menganalisis akar masalah, menentukan beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalah dan memilih salah satu alternatif solusi yang efektif dan efisien untuk penyelesaian masalah.
 - c) Menunjukkan/menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya suatu perubahan, agar dapat meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik, membuat prioritas perubahan, tahapan perubahan, bagaimana perubahan akan dilaksanakan, sumber daya yang dibutuhkan, peran bantuan (lembaga, modal, manajemen, teknologi, dan lain-lain) yang diperlukan.
- 4) **Pengorganisasian masyarakat**. Pengorganisasian dalam Islam bukan hanya sekedar wadah, tetapi suatu hal yang menegaskan pelaksanaan program yang dilakukan secara rapi, teraur, dan sistematis.²⁴ Terdapat lima hal yang harus ada pada suatu kelompok atau organisasi, yaitu perumusan tujuan, pendelegasian wewenang, pembagian pekerjaan dan tanggung jawab, dan rentangan kekuasaan tingkat-tingkat kekuasaan.²⁵

Dalam suatu desa setiap masyarakatnya tentu memiliki potensi atau keahlian dan kepribadian yang berbeda-beda. Ada masyarakatnya yang kreatif namun mereka tidak menyadari kemampuannya, ada masyarakatnya yang menyadari atas kemampuan yang

²⁴ Muhtarom Zaini Addasuyq dan Zainal Arifin, *Manajemen Dakwah* (Kudus, 2020), 24.

²⁵ *Ibid.*, 27.

dimilikinya namun enggan untuk mengembangkan, ada masyarakatnya yang menyadari kemampuannya dan mau mengembangkan namun enggan untuk membagi ilmunya. Untuk menanggapi hal ini, maka perlu adanya pendekatan secara mendalam dalam suatu daerah untuk menemukan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami karakter maupun kemampuan setiap masyarakatnya. Tahap ini penting untuk dilakukan, karena dengan mengelompokkan masyarakat dapat menciptakan semangat kerjasama, membagi tugas/peran sesuai dengan kemampuan, mempunyai pemimpin dan pengelola kelompok yang memiliki kemampuan menggerakkan anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam prinsip kesetaraan. Selain itu, dengan adanya suatu kelompok dapat memudahkan dalam melakukan perbaikan atau perubahan, menentukan dan memecahkan masalah, serta membentuk jaringan kemitraan untuk memperkuat posisi tawar yang sulit dilakukan sendiri.

- 5) **Pelaksanaan kegiatan**, meliputi:
 - a) Menyelenggarakan berbagai pelatihan/kursus untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, keterampilan manajemen dan perubahan sikap/perilaku dan pola pikir.
 - b) Pengembangan kegiatan, terutama mengenai pengembangan pendapatan, perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, dan pengembangan efisiensi kelembagaan/kelompok masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan merupakan hal yang penting, karena dengan peningkatan pendapatan dapat menjadi modal untuk pelaksanaan kegiatan yang diperlukan, untuk meningkatkan daya tawar, dan menciptakan kemandirian. Selain itu, peningkatan pendapatan mempunyai arti penting agar masyarakat memiliki keyakinan penuh bahwa peran bantuan yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup mereka, setidaknya secara finansial.
- 6) **Advokasi kebijakan**. Tahap ini dilakukan karena:
 - a) Segala upaya pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan, penguatan posisi tawar, dan lain-lain) memerlukan dukungan politik, yaitu

- kebijakan pemerintah yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
- b) Kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan dukungan politik dan penerimaan sekaligus pengakuan dari elit masyarakat (pejabat pemerintah, pengusaha, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, dan lain-lain).
- 7) **Politisasi**, berarti pemeliharaan berkelanjutan dan peningkatan posisi tawar melalui tindakan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan dari pihak politik dan keberlanjutan yang dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Politisasi ini harus dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
- a) Menanam "virus" atau agen perubahan yang berkomitmen agar dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dalam deretan birokrasi atau sistem pemerintah, politisi, pengusaha, dan lain-lain.
 - b) Menerapkan "tekanan" melalui media massa atau pers, forum ilmiah dan "kelompok atau group penekan".
 - c) Melaksanakan kegiatan atau aksi nyata dalam kelompok kecil yang memperlihatkan manfaat pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan.

i. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa dalam Pasal 23 adalah baik Kepala Desa yang dipanggil dengan nama berbeda, didukung oleh perangkat desa, atau disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa. Dalam suatu desa dibutuhkan seorang yang mampu mengelola untuk memenuhi kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Pasal 48 menyebutkan bahwa perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pengurus Daerah, dan

pelaksana teknis yang bertanggung jawab mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa.²⁶

Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjalankan dan juga menentukan berbagai kegiatan pembangunan dan pengelolaan program pembangunan. Dengan partisipasi dari masyarakat akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun desa. Kesejahteraan masyarakat suatu hal yang diinginkan oleh banyak orang, yang mana setiap orang mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan kepuasan kebutuhan dasar lainnya, seperti: kebersihan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan kebebasan dalam menganut agamanya masing-masing.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat pemerintah desa memiliki peran:

- 1) Sebagai fasilitator dalam setiap program pemberdayaan. Dalam hal ini, pemerintah membentuk dan mengembangkan organisasi maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan program pemberdayaan. Pemerintah sebagai fasilitator juga berperan dalam menggerakkan dan meningkatkan kapasitas organisasi maupun lembaga-lembaga dengan mengadakan dan mendampingi di berbagai macam pelatihan dan sosialisasi, memberikan semangat dan motivasi agar mereka mampu menjalankan fungsinya secara profesional dalam program pemberdayaan.
- 2) Sebagai sumber biaya dalam setiap program pemberdayaan. Modal biaya tersebut dapat diperoleh dari pemerintah desa sendiri, pemerintah daerah, *stakeholder*, lembaga-lembaga dan juga dari partisipasi masyarakat.
- 3) Sebagai sumber inovasi dalam pembangunan sosial. Pemerintah harus memiliki wawasan yang luas, dan ide-ide yang kreatif agar dapat menjadikan masyarakatnya lebih produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

²⁶ Mardi Liunsanda, "Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)," (Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, 2017).

- 4) Sebagai penasehat dan juga motivator. Pemerintah harus memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama dalam suatu kegiatan, pemerintah juga harus menggiring organisasi atau lembaga-lembaga dalam program pemberdayaan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 5) Sebagai asistensi (melakukan pendampingan), mentoring dan *coaching* dalam setiap program pengembangan. Kepala Desa memegang peranan penting dalam menggerakkan masyarakat agar mau terlibat dalam kegiatan pembangunan, karena diperlukan suatu elemen yang dapat menggerakkan dan mengarahkan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan cita-cita pembangunan.

j. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Setiap manusia pasti memiliki prinsip dalam hidupnya, dimana prinsip tersebut dijadikan tolak ukur setiap orang dalam berfikir dan bertindak. Begitu pula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam setiap kegiatan pemberdayaan harus memiliki prinsip yang jelas dan tegas, sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan tidak terjadi ketidakadilan atau ketimpangan sosial dalam pelaksanaannya.

Aswas (2014) menyebutkan bahwa aparat/petugas pemberdayaan harus memiliki prinsip yang dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat, agar kegiatan pemberdayaan dapat berlangsung dengan sasaran yang tepat. Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut Aswas (2014) yaitu:²⁷

- 1) Pemberdayaan dilakukan secara demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada paksaan karena setiap masyarakat memiliki permasalahan, kebutuhan dan peluang yang berbeda-beda, sehingga memiliki hak yang sama dalam setiap kegiatan pemberdayaan.
- 2) Setiap kegiatan pemberdayaan harus didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki oleh kelompok yang akan diberdayakan. Hal ini akan terlihat

²⁷ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 17-19.

jelas ketika proses identifikasi dan sosialisasi berlangsung pada tahap awal dengan keterlibatan penuh kelompok yang akan diberdayakan.

- 3) Objek utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus ditetapkan sebagai subjek/pelaku pemberdaya, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan dan bentuk kegiatan pemberdayaan.
- 4) Menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti semangat gotong royong, saling menghormati antara generasi muda dan orang tua, karena hal ini akan menjadi modal sosial dalam pembangunan.
- 5) Dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, karena pemberdayaan merupakan proses yang memakan waktu yang dilaksanakan secara logis dan juga sederhana yang mengarah pada persoalan yang lebih kompleks.
- 6) Mengamati dengan cermat keragaman karakter masyarakat, budaya dan adat istiadat yang telah mengakar atau bertahan dalam jangka waktu yang lama dari generasi ke generasi.
- 7) Memperhatikan semua aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi.
- 8) Tidak ada diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.
- 9) Selalu menerapkan pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif, seperti menentukan waktu, materi, metode, strategi dan tehnik kegiatan.
- 10) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, bahan, tenaga) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan).
- 11) Perangkat/agen pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator dengan keterampilan/kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada pada masyarakat. Bersedia bekerjasama dengan semua pihak meliputi organisasi, lembaga masyarakat/LSM, dan semua *stakeholder*.

2. Pengembangan Desa Wisata

a. Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan adalah usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Badan-badan

pembangunan biasanya mencakup beberapa hal, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan.²⁸

Undang-Undang (UU) Negara Republik Indonesia (NKRI) No. 6 tahun 2014 yang membahas tentang desa. Desa adalah organisasi pemerintahan yang terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat.²⁹ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum terkecil dengan batas wilayah yang jelas dan berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat kebiasaan desa yang diakui oleh negara.

Menurut Hadiwijoyo (2012) desa wisata adalah kawasan pedesaan dengan suasana asli dan khas, baik dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, arsitektur bangunan dan tata ruang desa yang unik, kegiatan ekonomi yang menarik, dan memiliki potensi yang dapat ditingkatkan, seperti atraksi, akomodasi, makanan dan minuman serta kebutuhan pariwisata lainnya.³⁰

Menurut Inskeep (1991) desa wisata adalah suatu bentuk pariwisata, dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dekat dengan kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil yang menjelajahi kehidupan desa dan lingkungan setempat. Sedangkan menurut Nuryanti (1992) desa wisata adalah bentuk keterpaduan atraksi, akomodasi dan layanan pendukung yang disajikan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang terstruktur dengan praktik dan tradisi yang dapat digunakan. Komponen utama desa wisata adalah (1) akomodasi, yaitu fasilitas penginapan yang ada di desa, dan (2) atraksi, yaitu seluruh aktivitas kehidupan penduduk dan latar belakang fisik desa yang memungkinkan wisatawan

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 39.

²⁹ Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" 8, no. 4 (2019): 367.

³⁰ Dyah Istiyanti and Fasilitator Stasiun Lapang Agro Kreatif Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village)," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Januari 2*, no. 01 (2020): 54.

untuk berintegrasi sebagai peserta aktif, seperti kursus tarian, bahasa, melukis dan yang lainnya.³¹

Terkait dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mendefinisikan pembangunan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan pada peluang untuk mengembangkan dan memajukan desa wisata. Secara khusus, pengembangan desa wisata diartikan sebagai upaya melengkapi dan meningkatkan pelayanan wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata adalah upaya untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dikerjakan secara bersama dan terencana dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa, seperti masyarakat dengan adat istiadatnya, masyarakat dengan kondisi lingkungannya, suasana alam desa, hubungan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya, dapat menjadi modal dari suatu desa untuk dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Secara umum, dalam pengembangan desa wisata diperlukan adanya pengelolaan yang berbasis potensi lokal. Dalam pengelolaan desa wisata diperlukan kepedulian dan juga partisipasi dari masyarakat setempat, agar masyarakat dapat selalu berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan lingkungan desanya yang dijadikan desa wisata. Menurut Sholihin (2009) pengelolaan adalah suatu proses kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan Siswanto (2012) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, seperti; pembinaan, pengurusan, pelaksanaan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya, dimana dalam pemberian istilah di masing-masing pihak dilatarbelakangi

³¹ Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, and M. Baiquni, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali," *Kawistara* 3, no. 02 (2013): 131.

³² Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, and M. Baiquni, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali," *Kawistara* 3, no. 02 (2013): 131-132.

oleh pekerjaan masing-masing. Pengelolaan dalam sudut pandang manajemen menurut George Terry terbagi menjadi empat tahap, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).³³

Menurut Damanik (2013) pembangunan pariwisata di pedesaan didorong oleh tiga faktor, yaitu:³⁴

- 1) Daerah pedesaan yang memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik. Masyarakat pedesaan tetap melaksanakan tradisi dan ritual budaya serta topografi yang cukup harmonis.
- 2) Daerah pedesaan yang memiliki kondisi lingkungan yang relatif utuh atau asli dan tidak terlalu tercemar oleh polusi dibandingkan di perkotaan.
- 3) Perkembangan ekonomi pedesaan yang relatif lambat pada tingkat tertentu, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat belum dapat direalisasikan secara optimal.

b. Kriteria Desa Wisata

Suatu desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata apabila memiliki kriteria dan faktor pendukung sebagai berikut.³⁵

- 1) Memiliki potensi produk atau daya tarik yang unik dan khas yang dapat dikembangkan, sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan. Potensi tersebut dapat berupa lingkungan alam dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- 2) Memiliki dukungan yang memadai terhadap ketersediaan sumber daya manusia lokal untuk mendukung pengelolaan desa wisata.
- 3) Memiliki peluang akses pasar. Faktor ini yang menjadi kunci, karena setiap desa yang sudah siap berkembang

³³ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 4-7.

³⁴ Dyah Istiyanti and Fasilitator Stasiun Lapang Agro Kreatif Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village)," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Januari 2*, no. 01 (2020): 54.

³⁵ Dinar Wahyuni, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial 9*, no. 01 (2018): 88.

menjadi desa wisata tidak ada artinya jika tidak ada interaksi dengan pasar atau wisatawan.

- 4) Potensi sumber daya manusia lokal yang mendukung kemungkinan akses pasar wisata.
- 5) Memiliki tempat tersendiri untuk pengembangan kawasan pelayanan penunjang desa wisata, seperti *home stay*, kawasan pelayanan umum, kawasan seni, dan lain-lain.

c. Kategori Desa Wisata

Menurut Victoria br. Simanungkalik dkk (2017) terdapat tiga kategori desa wisata yang ditinjau dari tingkat perkembangannya, yaitu.³⁶

- 1) Desa wisata embrio, merupakan desa dengan potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan di desa tersebut sudah ada gerakan dari masyarakat untuk mengubahnya menjadi desa wisata.
- 2) Desa wisata berkembang, merupakan desa wisata lokal yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan pemerintah desa, dan desa wisata tersebut sudah melakukan promosi dan sudah diminati oleh wisatawan.
- 3) Desa wisata maju, merupakan desa wisata yang sudah mengalami kemajuan atau berkembang melalui kunjungan wisata secara terus menerus dan dikelola secara profesional melalui pembentukan forum pengelola seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa. Desa wisata dalam kategori ini pada umumnya sudah bisa mempromosikan dan memasarkan dengan baik.

Sementara itu, desa wisata telah dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan karakteristik sumber daya dan keunikannya, sebagai berikut:³⁷

- 1) Desa wisata berdasarkan keunikan sumber daya budaya lokal yang akan menjadi daya tarik wisatawan

³⁶ Dinar Wahyuni, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9, no. 01 (2018): 88.

³⁷ Dinar Wahyuni, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9, no. 01 (2018): 89.

- 2) Desa wisata didasarkan pada keunikan sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama wisatawan, seperti pegunungan, perkebunan, pertanian, dan wilayah pesisir
- 3) Desa wisata yang mengkolaborasikan antara keunikan sumber daya alam dan adat istiadat atau budaya
- 4) Desa wisata berdasarkan keunikan kegiatan ekonomi kreatif yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, seperti kerajinan tangan, makanan dan minuman tradisional.

d. Persyaratan Desa Wisata

Terkait dengan definisi desa wisata, desa-desa yang dikembangkan dalam program desa wisata akan menjadi contoh yang baik bagi desa lain. Dalam hal ini, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah desa dapat ditetapkan sebagai desa wisata:³⁸

- 1) Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah bagi wisatawan untuk berkunjung dengan berbagai sarana transportasi.
- 2) Terdapat tempat-tempat menarik, seperti alam, legenda, seni budaya, makanan lokal, minuman lokal, dan sebagainya yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata.
- 3) Masyarakat dan aparat desa menerima dan memberikan dukungan yang maksimal terhadap desa wisata dan wisatawan yang berkunjung ke desa mereka.
- 4) Keamanan di desa terjamin, agar tidak menimbulkan bahaya terhadap masyarakat lokal maupun wisatawan, sehingga desa wisata tersebut tidak memiliki kesan negatif pada wisatawan.
- 5) Tersedia tempat tinggal atau *home stay*, tenaga kerja, dan telekomunikasi yang memadai.
- 6) Memiliki iklim sejuk atau dingin.
- 7) Terhubung dengan destinasi wisata lain yang sudah dikenal masyarakat luas.

e. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata

Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua

³⁸ Selamat Joko Utomo and Bondan Satriawan, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangloso Kabupaten Malang" 11, no. 02 (2017): 144.

pendekatan dalam mengembangkan kerangka kerja/konsep kerja desa sebagai desa wisata, yaitu melalui:³⁹

- 1) Pendekatan pasar
 - a) Komunikasi tidak langsung adalah model pembangunan yang diperlakukan sedemikian rupa sehingga desa mendapat manfaat tanpa komunikasi langsung dengan wisatawan melalui daya tarik yang dimiliki wisata.
 - b) Komunikasi semi/setengah langsung adalah perjalanan wisata sehari, kegiatannya meliputi makan dan berinteraksi dengan warga
 - c) Komunikasi langsung adalah wisatawan berhak tinggal di tempat tinggal milik desa. Pendekatan ini memerlukan beberapa kriteria, yaitu; (a) jarak tempuh; (b) atraksi wisata; (c) luas desa; (d) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatannya; (e) ketersediaan infrastruktur.

2) Pendekatan fisik

Pendekatan fisik berkaitan dengan adanya program pembangunan wisata. Pendekatan fisik dalam pengembangan desa wisata merupakan solusi umum untuk mengembangkan desa melalui industri pariwisata dengan menggunakan standar khusus untuk mengarahkan pembangunan wisata dan menerapkan langkah-langkah perlindungan terhadap wisata dan lingkungan sekitarnya.

f. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Masyarakat desa memiliki peran penting dalam mengembangkan desa wisata, karena sumber daya masyarakat serta keunikan tradisi dan budaya merupakan elemen utama dari aktivitas desa wisata. Di sisi lain, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan destinasi wisata merupakan bagian dari sistem ekologi yang saling berhubungan. Keberhasilan pembangunan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat setempat (Wearing,

³⁹ Selamat Joko Utomo and Bondan Satriawan, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangloso Kabupaten Malang" 11, no. 02 (2017): 143-144.

2001).⁴⁰ Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan merupakan aktor penting dalam pengembangan desa wisata di semua tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan.

Menurut Timothy (1999), partisipasi masyarakat dalam pariwisata memiliki dua perspektif yaitu keterlibatan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan dan terkait dengan manfaat yang diterima komunitas dari program pengembangan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan keinginan dan tujuan dari komunitas lokal dalam pembangunan dan kemampuan mereka untuk menyerap manfaat pariwisata.⁴¹

Peran serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan program pemberdayaan yang berkelanjutan yaitu:

- 1) Masyarakat merupakan suatu alat dalam memperoleh informasi mengenai profil, kondisi, dan kebutuhan wilayah serta adat tradisi dan sikap masyarakat setempat
- 2) Masyarakat sebagai sumber daya manusia yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan dan juga dalam pengawasan di setiap program pemberdayaan maupun pembangunan sosial
- 3) Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam program pemberdayaan, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga dan merawat kebersihan dan kenyamanan lingkungan, melestarikan budaya baik secara fisik maupun non fisik serta partisipasi mereka dalam mendukung berbagai kegiatan atraksi wisata

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah dibuat oleh penulis lain yaitu:

⁴⁰ Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, and M. Baiquni, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali," *Kawistara* 3, no. 02 (2013): 132.

⁴¹ Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, and M. Baiquni, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali," *Kawistara* 3, no. 02 (2013): 132.

1. Penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul*" skripsi karya Prasthiwi Siti Sundari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.⁴² Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah terbentuknya Desa Wisata Karang Tengah berdasarkan pembagian lahan di kawasan Sultan Ground, dilanjutkan dengan terbentuknya kelompok tani Catur Makaryo untuk mengkoordinir pengelolaan lahan di kawasan Sultan Ground dan masuknya Bank BNI Yogyakarta. Setelah itu lahirlah ide untuk menjadikan Desa Karang Tengah sebagai desa wisata dan diresmikan pada tahun 2010. Melihat banyaknya peluang di Desa Karang Tengah maka lahirlah desa wisata Karang Tengah yang memenuhi syarat sebagai desa wisata. Adapun potensi desa yang ada yaitu: aksesibilitas yang baik, adanya destinasi yang menarik, perkampungan dan pengelolaan desa yang mendukung, tenaga kerja yang cukup, iklim yang sejuk dan terhubung dengan tempat wisata terkenal lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, program ini dilaksanakan melalui fase penyadaran, fase kapasitas, dan fase pemberdayaan. Fase penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dari pengelola desa wisata Karang Tengah, rapat desa, kunjungan atau studi banding. Pada fase pengkapsitan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat melalui pembelajaran bahasa asing, pelatihan *home stay*, pelatihan desain dan seni kriya. Fase pendayaan adalah pada saat masyarakat mendapatkan insentif berupa pinjaman sebagai modal untuk mengembangkan perusahaan atau usaha sesuai dengan kemampuannya.
2. Penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata (Studi pada Kelompok Mina Sejahtera di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati)*" skripsi tahun 2019 karya Alfiatun Ni'mah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

⁴² Prasthiwi Siti Sundari, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata Di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Walisongo Semarang.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata terdapat tiga tahap, yaitu proses penyadaran, upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi yang ada dengan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan melalui Musyawarah Desa untuk bersama-sama memutuskan dan membentuk kelompok sebagai pengembangan awal budidaya. Proses peningkatan kapasitas dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan serta sistem pemasaran. Proses penguatan atau pendayaan, dengan adanya dukungan pemerintah melalui peresmian desa Talun sebagai desa wisata, bantuan finansial sebagai modal usaha, dukungan perbaikan sarana dan prasarana dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah. Ada tiga opsi mengenai dampak kegiatan pemberdayaan di Desa Talun, yaitu (1) dalam hal ekonomi; a) peningkatan akses ekonomi, b) ketersediaan lapangan kerja, c) peningkatan pendapatan, d) perubahan lapangan kerja, (2) dalam hal sosial dan budaya; a) dihormati oleh keluarga dan masyarakat sekitar, b) hubungan baik dengan masyarakat lokal dan wisatawan, c) kegiatan keagamaan yang aktif, (3) dalam hal sosial-ekologi; a) peningkatan infrastruktur pendukung desa wisata, b) pembangunan sistem irigasi.

3. Penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening*" karya Dyah Istiyanti Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Vol. 2, No. 01, Januari 2020 dari Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi desa yang dapat dijadikan modal untuk menjadi desa wisata yaitu kegiatan budaya yang dilakukan oleh kelompok Sarapala, beternak kelinci,

⁴³ Alfiatun Ni'mah, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Pada Kelompok Mina Sejahtera Di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

⁴⁴ Dyah Istiyanti and Fasilitator Stasiun Lapang Agro Kreatif Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village)," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Januari 2*, no. 01 (2020): 53-62.

budidaya edamade, dan produk sandal. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dilakukan dalam tiga tahap, yaitu; tahap penyadaran melalui sosialisasi pengembangan desa wisata meliputi: pemasaran, sosialisasi air dan kesehatan, pemetaan potensi desa dalam rangka pengembangan wilayah desa, dan pelatihan pembuatan biodiesel dan sabun dari limbah bekas. Tahap tranformasi kemampuan, yaitu dengan peningkatan kapasitas masyarakat, organisasi serta sistem nilai. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan edukasi yang mumpuni dalam pengelolaan desa wisata, hal ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaku wisata. Tahap pengembangan kapasitas intelektual yaitu untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas untuk membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif agar menjadi masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi dan juga pelatihan sehingga terjadi peningkatan pada kemampuan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penilaian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan.

4. Penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*" karya Musangin, Desy Kusniawati dkk, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.1, Desember 2017, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat terjadi melalui optimalisasi program desa wisata sebagai aset wisata berbasis potensi masyarakat lokal. Bumiaji sebagai desa wisata telah membawa perubahan untuk masyarakat lokal khususnya dalam menumbuhkan ilmu pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Melalui pemanfaatan sumber daya alam yaitu kawasan pertanian yang dijadikan wisata, salah satu yang mendajadi unggulan yaitu wisata petik apel, dan tanaman bunga krisan, atraksi budaya lokal berupa kesenian jaranan. Proses pemberdayaan yang dilakukan di Desa Bumiaji yaitu: membentuk tim desa wisata sebagai pengelola dan juga agen

⁴⁵ Mustangin et al., "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 01 (2017): 59-72.

pemberdaya, pendampingan kepada tim desa wisata dalam mengoptimalkan potensi desa, pendampingan atraksi kesenian jaranan kepada pemuda Bumiaji, dan pendampingan oleh PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) kepada kelompok tani mengenai jenis bibit dan pupuk baru untuk mengembangkan produktifitas apel.

Dari keempat penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara” mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan keempat penelitian diatas adalah: (1) Lokasi penelitian yang terletak di Desa Somosari, Batealit, Jepara, (2) Objek penelitian, meliputi partisipasi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi warga desa dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, dan penggunaan strategi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, dan (3) Terdapat uraian mengenai faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara pantas untuk diteliti dengan membahas kembali permasalahan yang ada di lokasi yang berbeda.

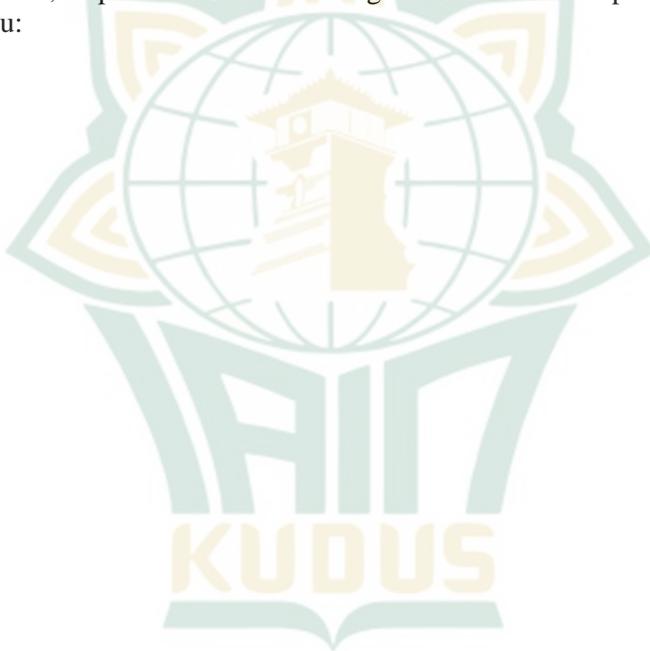
C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah menafsirkan suatu objek masalah yang berasal dari kita, bukan dari pendapat orang lain. Saat menyusun kerangka refleksi harus didasarkan pada teori-teori yang relevan dan menggunakan argument yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan yang akan dijadikan hipotesis untuk pertanyaan penelitian.⁴⁶

Desa Somosari memiliki potensi untuk memanfaatkan sumber daya alamnya yang indah dan mempesona sebagai desa wisata. Namun dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah beberapa diantaranya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat di Desa Somosari yang menekankan masyarakat tidak

⁴⁶ Fitrianti, *Sukses Profesi Guru Dengan Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 43-44.

hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara kreatif dan inovatif. Dalam proses pelaksanaannya memerlukan pelaksanaan program pemberdayaan dengan strategi dan pendekatan yang tepat agar program pemberdayaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Somosari dapat menciptakan masyarakat yang produktif atau mandiri secara finansial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan kerangka berfikir dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

